

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang menjadi perbedaan terletak pada penyebab dari pengangguran itu sendiri. Pada negara maju, munculnya pengangguran lebih terkait dengan pasang surut kegiatan ekonomi dan bisnis. Sedangkan di negara berkembang (termasuk Indonesia), masalah pengangguran muncul karena ketiadaan lapangan kerja, tingginya angkatan kerja, kelangkaan investasi dan juga masalah sosial politik dalam negeri (Limongan:2001). Pada umumnya pengangguran didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat bekerja karena tidak tersedianya lapangan kerja. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan maka tidak memiliki penghasilan dan hal ini berdampak pada rendahnya taraf hidup.

Seperti halnya negara berkembang lainnya, tingkat pengangguran di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kurangnya investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang semakin meningkat dan kondisi sosial politik dalam negeri. Salah satu contoh peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintah maupun swasta untuk menciptakan kesempatan kerja, maupun perlindungan terhadap tenaga kerja. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut, jumlah pengangguran meningkat tajam, karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerjanya. Selain itu, banyak perusahaan

yang tidak mampu untuk bertahan menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 sehingga banyak yang terpaksa menutup perusahaan. Ditambah lagi pertambahan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya angkatan kerja.

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius. Lebih prihatin lagi di beberapa negara miskin bukan saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja semakin bertambah tinggi (Sukirno, 1985:65).

Akibat adanya pengangguran, banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam keadaan miskin dan melarat. Dampak berikutnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, prostitusi, meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, putus sekolah, anak jalanan dan sebagainya. Berbagai masalah

sosial ini merupakan penyakit masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, moralitas dan merendahkan martabat manusia.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu tingkatan produk perkapita pada suatu negara yang berlangsung secara terus – menerus dari tahun ke tahun dalam kurun waktu yang panjang. Jika laju pertumbuhan ekonomi disuatu negara meningkat maka produksi barang dan jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, yang menyebabkan meningkatnya standar hidup masyarakat. Laju ekonomi yang tinggi disuatu negara akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Namun sebaliknya apabila laju ekonomi tersebut menurun maka akan berdampak terhadap sedikitnya kesempatan kerja untuk masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran di negara tersebut. (Fatmi Ratna N. 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Suatu Negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan terus-menerus tiap tahunnya akan memajukan pembangunan di negara tersebut. Dalam ekonomi makro dijelaskan keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan GDP). Keberhasilan pembangunan suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, naik turunnya ekonomi tentunya akan mempengaruhi beberapa sektor. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang meningkat tentu akan meningkatkan pendapatan per kapita sehingga dapat meningkatkan konsumsi

rumah tangga. Selain itu, pertumbuhan ekonomi meningkat akan meningkatkan pula investasi sehingga terjadi pembangunan diberbagai daerah. (Fatmi Ratna N. 2010)

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tertentu. Disamping itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, hal itu merupakan kelebihan Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Namun disisi lain hal itu akan mempunyai dampak yaitu tersedianya angkatan kerja yang besar. Pertumbuhan angkatan kerja yang pesat yang tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja serta penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau klasifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja akan menimbulkan masalah pengangguran pada suatu negara. Tingkat pengangguran yang besar mencerminkan lambatnya atau kurang berhasilnya

pembangunan suatu negara. Kaum klasik berpendapat bahwa penduduk yang semakin banyak jumlahnya berakibat penurunan pada pendapatan nasional, dan hal tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah penduduk pada suatu negara akan menyebabkan lonjakan angkatan kerja. Dengan sempitnya jumlah lapangan kerja yang tersedia di suatu negara, para angkatan kerja tidak akan terserap sepenuhnya.

Jumlah tingkat pengangguran serta angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan yang berarti bahwa tingkat pengangguran dan angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan proses ekonomi. Ini menggambarkan bahwa dinamika proses pembangunan harus mampu melibatkan seluruh angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja yang besar itu dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Kaum klasik berpendapat bahwa penduduk yang semakin banyak jumlahnya berakibat penurunan pada pendapatan nasional, dan hal tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah penduduk pada suatu negara akan menyebabkan lonjakan angkatan kerja. Dengan sempitnya jumlah lapangan kerja yang tersedia di suatu negara, para angkatan kerja tidak akan terserap sepenuhnya.

Jumlah tingkat pengangguran serta angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan yang berarti bahwa tingkat pengangguran dan angkatan kerja

merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan proses ekonomi. Ini menggambarkan bahwa dinamika proses pembangunan harus mampu melibatkan seluruh angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja yang besar itu dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Dimasa sekarang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan.

Dalam UUD 1945 pasal 28C yang telah diamandemen disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” . Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa besarnya porsi anggaran pendidikan adalah 20 persen dari total APBN. Ini mengimplikasikan bahwa komitmen bangsa ini untuk menempatkan pendidikan sebagai salah satu komponen sumber daya pengetahuan, sehingga dipahami bahwa pengetahuan akan menjadi pembangkit kemajuan ekonomi. (BPS,2012)

Dimata penduduk berkembang, pendidikan dipandang sebagai sarana guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Atau dalam bahasa lain, tujuan akhir dari program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Setidaknya masyarakat yang telah mengenyam pendidikan setelah selesai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih berkelas di sektor formal. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan yang mereka dapatkan kelak. Semakin lama jangka waktu yang masyarakatkan habiskan untuk mendapatkan pendidikan semakin tinggi atau bermartabat pula pekerjaan yang mereka dapatkan dan semakin terhindar mereka dari masalah pengangguran.

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Pada umumnya untuk bekerja di bidang perkotaan atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan orang-orang atau tenaga kerja berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Per
Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (L)		Perempuan (P)		L+P
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kulon Progo	206.494	49,46	210.979	50,54	417.473
Bantul	458.914	50,24	454.493	47,76	913.407
Gunung Kidul	375.168	50,06	374.279	49,94	749.447
Sleman	538.704	50,66	524.744	49,34	1.063.448
Yogyakarta	199.466	48,90	208.458	51,10	407.904
Total	1.778.726	50,08	1.772.953	49,92	3.551.679

Sumber: BPS Data Kependudukan DIY Semester II Tahun 2014, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (diolah kembali)

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2014 berdasarkan data kependudukan DIY Semester I tahun 2014 adalah sebanyak 3.551.679 orang dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.778.726 orang dan perempuan sebanyak 1.772.953 orang. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 100,33.

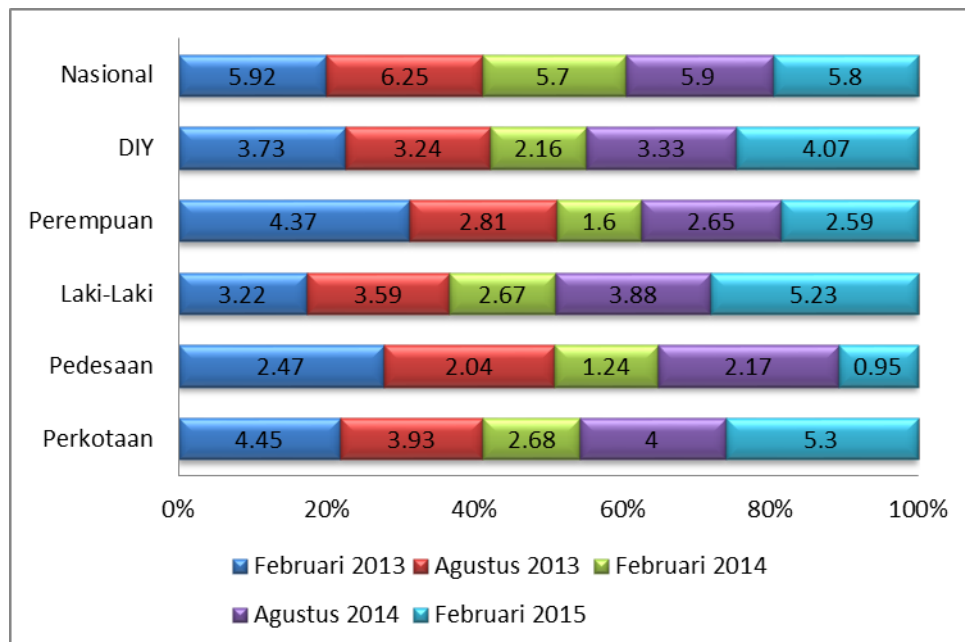
Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.063.448 orang (29,94%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 913.407 orang (25,72%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 749.447 orang (21,10%), Kabupaten Kulonprogo sebanyak 417.473 orang (11,75%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk tersedikit sebanyak 407.904 orang (11,48%).

Tabel 1.2

**Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah dan Jenis Kelamin D.I.
Yogyakarta Februari 2013 – Februari 2015**

Tahun		Nasional	DIY	Perempuan	Laki-Laki	Pedesaan	Perkotaan
2013	Februari	5.29	3.73	4.37	3.22	2.47	4.45
	Agustus	6.25	3.24	2.81	3.59	2.04	3.93
2014	Februari	5.7	2.16	1.6	2.67	1.24	2.68
	Agustus	5.9	3.33	2.65	3.88	2.17	4
2015	Februari	5.8	4.07	2.59	5.23	0.95	5.3

Sumber : BPS dari Sakernas D.I. Yogyakarta Februari 2012- Februari 2014



Sumber : BPS dari Sakernas D.I. Yogyakarta Februari 2012- Februari 2014

Gambar 1.1

Hasil Sakernas D.I. Yogyakarta Februari 2013 - Februari 2015 menunjukkan TPT daerah perkotaan lebih besar dari daerah pedesaan. TPT perkotaan D.I. Yogyakarta Februari 2015 sebesar 5,3 persen, jika dibandingkan pada Februari 2014 sebesar 2,68 persen mengalami penurunan 2,62 poin hal ini dipengaruhi oleh beragamnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pusat perekonomian sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan, pindah atau mondok di perkotaan sehingga pengangguran lebih nampak kuantitatifnya. TPT D.I. Yogyakarta Februari 2015 di pedesaan sebesar 0,95 persen, jika dibandingkan pada Agustus 2014 sebesar 2,17 persen mengalami penurunan 1,22 poin atau 0,29 poin jika dibandingkan pada Februari 2014 sebesar 1,24 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan penduduk pedesaan biasanya tidak terlalu selektif memilih lapangan pekerjaan, sehingga akan melakukan kegiatan apa saja walau hanya sebagai pekerja keluarga, pekerja bebas pertanian dan sebagian masih bertahan di pedesaan dengan berusaha mencari pekerjaan dengan cara melaju ke perkotaan, apalagi dengan kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor dan semakin baiknya kondisi infrastruktur fasilitas jalan raya. TPT D.I. Yogyakarta Februari 2015 menurut jenis kelamin laki-laki sebesar 5,23 persen masih lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 2,59 persen, karena laki-laki sebagai kepala keluarga khususnya di usia angkatan kerja lebih reaktif dalam upaya untuk bisa mendapat status bekerja.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor

jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran di daerah tersebut menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.

Masalah pengangguran penting untuk dianalisa karena pengangguran ini akan menimbulkan gejolak sosial politik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu daerah bahkan suatu negara. Pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena orang yang menganggur berarti tidak berpenghasilan dan bekerja tidak penuh. Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan terhadap pengangguran telah banyak dilakukan, namun penelitian ini tetap penting dilakukan karena pengangguran perlu diperhatikan mengingat dampaknya yang sangat luas bagi perekonomian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan berbagai gambaran di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai keadaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih judul sebagai berikut : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Perumusan Masalah

Masalah pengangguran masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian suatu daerah di Indonesia termasuk Yogyakarta. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut. Dikaitkan dengan kondisi Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana sifat dan signifikansi dalam variabel-variabel yaitu laju pertumbuhan ekonomi, upah dan angkatan kerja terhadap pengangguran di Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian peneliti mencoba melihat :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan hasil yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan terhadap pemerintah dan lembaga Provinsi D.I Yogyakarta serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Yogyakarta

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik, menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di bangku kuliah yang digunakan sebagai bekal ketika nanti terjun ke masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi pembaca dan memberikan informasi tentang tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian dengan judul sejenis.

4. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang keadaan tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.